



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Antisipasi Banjir, DKI Normalisasi Sungai

JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta menyiapkan anggaran sebesar Rp600 miliar untuk pembebasan lahan normalisasi sungai/kali pada 2020. Pembangunan fisik normalisasi sempat terhenti karena terkendala pembebasan lahan.

Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Juaini mengatakan, anggaran pembebasan lahan tahun ini sebesar Rp850 miliar sudah digunakan Rp350 miliar. Untuk membebaskan lahan dibutuhkan Rp500 miliar. Namun karena waktu sudah mendekati batas penggunaan anggaran, pembebasan lahan sisa tahun ini didrop pada APBD 2020.

Dinasnya kembali mengusulkan anggaran pembebasan lahan normalisasi Rp600 miliar agar tahun depan ada pembebasan lahan baru selain lahan yang sudah diinventarisasi pada 2019. "Tahun ini kita bebaskan lahan untuk normalisasi Kali Ciliwung. Pengerjaannya tahun depan. Untuk pembebasan lahan tahun depan itu, pembangunan fisiknya pada 2021," ujar Juaini di Gedung DPRD DKI Jakarta kemarin.

Pembebasan lahan tentunya berdampak terhadap pengendalian banjir saat musim hujan di mana program normalisasi kali secara otomatis terhenti akibat lahannya belum dibebaskan. Padahal, normalisasi kali merupakan salah satu upaya pengendalian banjir. "Saat ini sudah banyak pemilik lahan datang ke kantor untuk proses pembayaran," ucapnya.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane Bambang Hidayah mengatakan salah satu upaya mengatasi banjir melalui normalisasi kali. Normalisasi membuat kapasitas kali atau sungai menjadi lebih banyak menampung debit air. Sayangnya, program normalisasi sepanjang 33 kilometer/km yang dimulai sejak 2013, baru berjalan sekitar 48% atau baru 16 km dan masih ada sekitar 17 km yang belum dinormalisasi. Normalisasi terhenti sejak Februari 2018 lantaran Pemprov DKI belum melakukan pembebasan lahan. "Tahun depan kita kerjakan sepanjang 1,5 km di Kali Ciliwung. Lokasinya di Pejaten Timur karena baru *segitu* pembebasan lahannya," ujar Bambang.

Lahan yang statusnya sudah dibebaskan Pemprov DKI, baru tersebar di delapan kelurahan yakni Gedong, Balekambang, Cililitan, Cawang, Kampung Melayu, Tanjung Barat, Pejaten Timur, serta Bukit Duri. "Untuk merealisasikan normalisasi dan naturalisasi, pemerintah pusat mengucurkan dana sebesar Rp26 miliar," katanya.

Menurut pengamat perkotaan Universitas Trisakti Nirwono Joga, solusi utama mengatasi banjir di Jakarta bukan dengan

normalisasi. Konsep normalisasi dengan pembetonan tidak akan berkelanjutan. Seharusnya Pemprov DKI harus bisa menggunakan pendekatan lingkungan dalam mengatasi banjir di wilayahnya, misalnya mengoptimalkan waduk dan menggunakan pohon bambu untuk normalisasi agar ekosistem terjaga termasuk memperbanyak sumur resapan. "Kita butuh air bersih terutama untuk cadangan air di musim kemarau. Jadi ya lakukan vertikal *drain*, buat waduk dan sumur resapan sebanyak-banyaknya di dataran rendah," ungkapnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan selama volume air dari hulu tidak dikendalikan maka sebesar apa pun yang dibuat, secepat apa pun jalur sampai laut, Jakarta akan selalu menghadapi masalah banjir. Pasalnya, permukaan air tanah lebih rendah ditambah permukaan air laut yang tinggi menyebabkan air dari hulu tidak bisa dikendalikan. "Strategi yang harus kita dorong lebih jauh adalah membangun kolam retensi di hulu sehingga volume air yang ke Jakarta terkendali," ujar Anies beberapa waktu lalu.

Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu mengaku

sudah berbicara dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, bahkan Presiden Joko Widodo menginstruksikan percepatan pembangunan di hulu. "Karena apa pun yang kita kerjakan di hilir, apalagi dengan permukaan air laut yang tinggi, kecepatan air yang tinggi dengan volume besar tidak mungkin bisa dipompa cepat ke laut. Jadi, kita dorong ke sana, itu yang sedang kita lakukan jangka panjang," katanya.

Anggota DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai Pemprov DKI tidak memiliki terobosan dalam penanganan banjir. Seharusnya Gubernur jangan menyalahkan dan menunggu penanganan banjir di hulu tanpa mengantisipasi dampak di masyarakat.

Selain itu, program normalisasi sungai yang selalu digemborkan Anies tidak mampu diterjemahkan oleh aparat di bawahnya atau satuan kerja perangkat daerah. Menurutnya, Anies tidak mau menggusur warga yang mengokupansi bantaran sungai, sedangkan sungai-sungai di Jakarta masih butuh lahan untuk dilebarkan.

● bima setiyadi

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Antisipasi Banjir, DKI Normalisasi Sungai

PROYEK BERLANJUT

Normalisasi sungai/kali kembali dilanjutkan pada 2020. Program normalisasi merupakan salah satu upaya pengendalian banjir di DKI Jakarta.



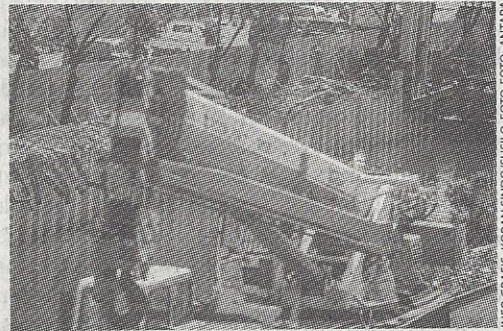
2019: Rp850 Miliar

2020: Rp600 Miliar

Sumber: Pemprov DKI/diolah dari berbagai sumber

LAHAN SUDAH DIBEKASKAN

- Gedong
- Cililitan
- Kampung Melayu
- Pejaten Timur
- Balekambang
- Cawang
- Tanjung Barat
- Bukit Duri



INFO GRATIS: KORAN SINDO/SUSILO. FOTO-FOTO: ANIARA

Pemerintah pusat mengucurkan normalisasi dan naturalisasi sebesar Rp26 miliar

PROGRAM NORMALISASI

01

Normalisasi sepanjang 33 km yang dimulai sejak 2013 baru berjalan sekitar 48% atau baru 16 km dan masih ada 17 km lagi yang belum dinormalisasi.

02

Normalisasi terhenti sejak Februari 2018 lantaran Pemprov DKI belum melakukan pembebasan lahan. Normalisasi dapat membuat kapasitas sungai/kali menjadi lebih banyak menampung debit air

03

Tahun depan Pemprov DKI mengerjakan 1,5 km di Kali Ciliwung. Lokasinya di Pejaten Timur.

